

ABSTRAK

Tesis ini disusun oleh Anis Fauzan dengan Nomor Induk Mahasiswa 2410622028, mengangkat judul "Eksistensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah". Penulisan penelitian ini dilakukan di bawah arahan dan bimbingan tim pembimbing materi penulisan tesis pada Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini di Indonesia yang dinilai masih terfragmentasi dan belum optimal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model institusional ideal dari badan peradilan khusus dalam menangani sengketa Pilkada di Indonesia guna mewujudkan keadilan elektoral yang substantif. Latar belakang penelitian ini menyoroti kompleksitas sengketa Pilkada, mulai dari beban perkara di Mahkamah Konstitusi hingga konflik norma pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menghapus sifat sementara kewenangan MK, serta terabaikannya keadilan substantif akibat formalisme hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi perbandingan hukum dengan negara lain. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada saat ini terfragmentasi secara rigid antara Mahkamah Konstitusi (hasil), Bawaslu dan

PTUN (proses), serta DKPP (etik), yang mengakibatkan inefisiensi dan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Hasil penelitian kedua merekomendasikan PTUN sebagai lembaga peradilan yang mengintegrasikan penyelesaian sengketa proses, etik, dan hasil pilkada melalui sistem satu pintu (*one-door system*) dengan putusannya bersifat *inkracht* dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, layaknya model di Brazil dan Meksiko dengan melakukan perubahan dan penyesuaian pada perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Novelty* dari penelitian ini menawarkan konsep reposisi fungsi adjudikasi dari Bawaslu dan DKPP kembali kepada rumpun kekuasaan kehakiman guna mengembalikan kedudukan sebenarnya dari Bawaslu sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) yang murni menjalankan fungsi pengawasan dan pengumpulan bukti, bukan sebagai pemutus sengketa.

Kata Kunci: Sengketa Pilkada, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Keadilan Elektoral.

ABSTRACT

This thesis was written by Anis Fauzan, Student ID Number 2410622028, under the title “*Eksistensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.*” This research was conducted under the direction and guidance of the thesis advisory committee at the Master of Law Program, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

This study aims to explore the current mechanisms for resolving local head election disputes in Indonesia, which are considered to be fragmented and suboptimal. Additionally, this study aims to analyze and formulate an ideal institutional model for a special judicial body to handle local head election disputes in Indonesia in order to achieve substantive electoral justice. The background of this research highlights the complexity of local election disputes, ranging from the caseload at the Constitutional Court to normative conflicts following Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, which removed the temporary nature of the Constitutional Court’s authority, as well as the neglect of substantive justice due to legal formalism.

The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, supported by comparative legal studies with other countries. The findings of the second study recommend the Administrative Court (PTUN) as a judicial institution that integrates the resolution of disputes regarding the process, ethics, and results of regional elections through a one-door system, with its decisions being final and binding and not subject to further legal

action, similar to the models in Brazil and Mexico, by making amendments and adjustments to Law No. 5 of 1986 on the PTUN and Law No. 7 of 2017 on Elections. The novelty of this study lies in proposing the repositioning of the adjudicative functions of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the Election Dispute Settlement Commission (DKPP) back within the judicial branch to restore Bawaslu's true status as a state auxiliary organ that purely performs oversight and evidence-gathering functions, rather than acting as a dispute adjudicator.

Keywords: Local Head Election Dispute, Special Judicial Body, Constitutional Court, Supreme Court, Electoral Justice.